

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini Indonesia sedang dihadapkan dengan tantangan menuju manifestasi Indonesia Emas 2045. Indonesia emas 2045 dapat direngkuh bila disertai adanya eskalasi pembangunan ekonomi secara masif. Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia dapat menjadi lokomotif utama pembangunan ekonomi. Kuantitas sumber daya manusia yang besar berimplikasi pada eskalasi potensi pembangunan ekonomi lewat peningkatan produktivitas. Indonesia diberkahi jumlah populasi yang begitu besar, namun populasi yang besar juga dapat menimbulkan tantangan bila hanya berkumpul pada satu daerah padat yang berimplikasi pada munculnya permasalahan sosial (Ayu et al., 2023).

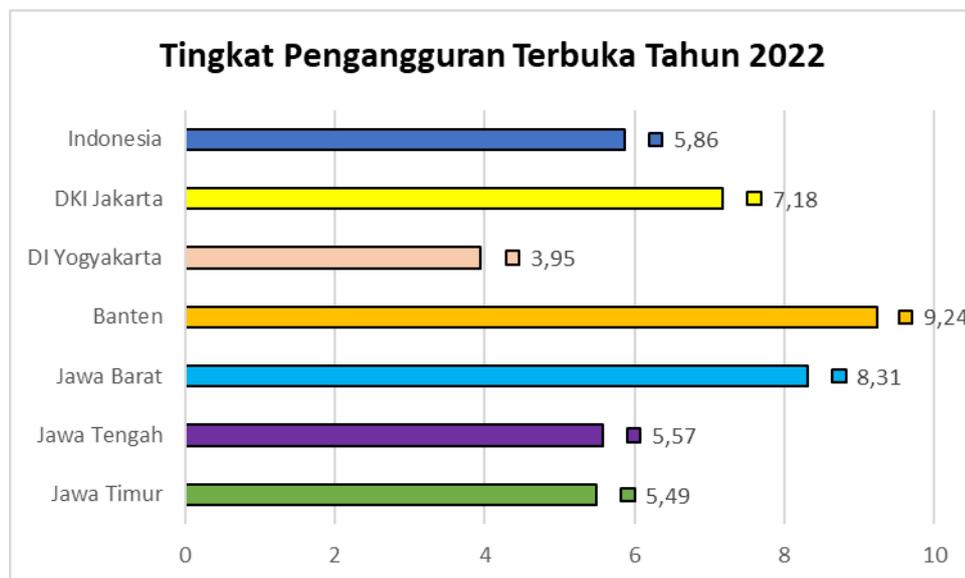
Pengangguran kerap menjadi topik hangat dalam pembicaraan dan menjadi perhatian utama dalam kontestasi politik guna invensi lapangan kerja secara menyeluruh (Mankiw, 2010). Pengangguran menjadi masalah yang memiliki urgensi di seluruh dunia dan memiliki korelasi yang berkaitan dengan faktor lain, namun berada pada pola yang tidak sistematis (Herniwati & Handayani, 2019)

Pengentasan masalah ini menjadi krusial karena berimplikasi pada beban perekonomian yang ditujukan adanya ketidakefektifan pendayagunaan faktor produksi yang berimplikasi pada kemiskinan akibat tingkat kesejahteraan tidak diperoleh secara maksimal (Muslim, 2014). Pengangguran sendiri menurut Sukirno dalam (Prakoso, 2020) suatu kondisi yang

membuahkan masalah yang berimplikasi pada perekonomian dan masalah sosial. Tingkat pengangguran yang tinggi akan menjelma masalah seperti kriminalitas yang didorong karena kemiskinan.

Indonesia merupakan negara berkembang yang selalu berkuat dalam masalah pengangguran. Individu yang termasuk angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, individu yang sedang tidak mencari pekerjaan, dan individu yang sudah mendapatkan pekerjaan namun belum memulai kerja dikategorikan dalam pengangguran terbuka. (Chalid & Yusuf, 2014).

Gambar 1.1
TPT di Pulau Jawa Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, (2020)

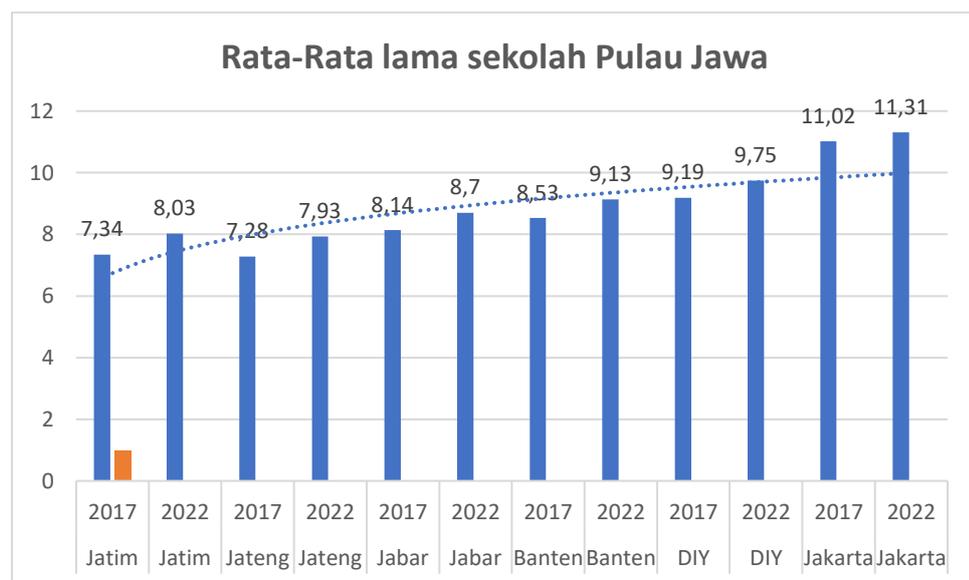
Pada grafik 1.2 menyiratkan bahwasannya di Pulau Jawa mengalami perbedaan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di berbagai provinsi di Pulau Jawa. Provinsi Banten menempati posisi pertama dalam Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yakni senilai 9,24%. DKI Jakarta sebagai daerah metropolitan yang kerap dijadikan sebagai tempat mencari pekerjaan

oleh masyarakat Indonesia menempati posisi ketiga dibawah Provinsi Jawa Barat dengan nilai 7,18%. Penawaran tenaga kerja yang tinggi tidak dapat diimbangi dengan penawaran lapangan kerja. Kondisi tersebut berimplikasi pada tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi DKI Jakarta. DI Yogyakarta menjadi Provinsi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) paling rendah di Pulau Jawa. DI Yogyakarta mencatatkan nilai TPT sebesar 3,96% lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia dalam bentuk pengangguran jika dilihat dari kaca mata Provinsi dalam Pulau Jawa masih berada dalam kategori tinggi. Rekonstruksi penyelesaian masalah ekonomi harus dilakukan bersama-sama dengan melakukan sinergi antara pemerintah sebagai *stakeholder* serta masyarakat. Pemerintah dituntut untuk merumuskan metode-metode yang sistematis dan strategis guna mengejawantahkan penyusutan angka pengangguran di Indonesia.

Pendidikan merupakan pondasi utama dalam (*human investment*) dalam teori modal manusia yang berimplikasi pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan berpengaruh pada penyusutan tingkat pengangguran dengan diikuti terciptanya eskalasi kesejahteraan masyarakat dan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pengangguran, semakin tinggi tingkat pendidikan individu berimplikasi pada kualitas tenaga kerja tersebut.

Investasi manusia dapat dilihat melalui kaca mata stok manusia, di mana individu setelah mengenyam pendidikan dalam berbagai jenis dan bentuk diharapkan berimplikasi pada eskalasi nilai seperti penghasilan individu, produktivitas kerja, dan peningkatan nilai rasional individu. Pendidikan juga secara tidak langsung berpengaruh dalam pemenuhan kebutuhan individu dengan meningkatkan produktivitas sehingga tercapainya standar hidup yang lebih baik. Ilmu pengetahuan tidak mengalami *diminishing return* tidak seperti modal fisik, tanah, dan angkatan kerja yang bekerja (Muslim, 2014).



Grafik 1.2 RLS Pulau Jawa Tahun 2022

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Grafik 1.2 menunjukkan rata-rata lama sekolah 6 provinsi di Pulau Jawa periode 2017 dan 2022 yang konsisten mengalami eskalasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terjadi eskalasi kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan rata-rata lama

sekolah tertinggi dengan nilai 11,02% pada tahun 2017 dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 senilai 11,31%. Provinsi Banten mencatatkan nilai yang cukup tinggi pada tahun 2017 senilai 8,53% dan meningkat tahun 2022 senilai 9,13%.

Banten menjadi Provinsi dengan TPT tertinggi dibandingkan dengan enam Provinsi di Pulau Jawa. Hal itu mengindikasikan adanya perbedaan dengan teori modal manusia, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan individu maka berimplikasi terhadap eskalasi produktivitas dan menyebabkan penyusutan tingkat pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu variabel yang mempengaruhi pengangguran. Pertumbuhan ekonomi yang pesat berimplikasi pada eskalasi profitabilitas perusahaan yang mengarah pada penciptaan lebih banyak lapangan kerja (Suparman & Muzakir, 2023) Kondisi tersebut mengidentifikasi bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi berimplikasi pada tingginya angka pengangguran.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju pertumbuhan di enam provinsi di Pulau Jawa. Pandemi memukul laju pertumbuhan ekonomi, dimana 6 Provinsi di Pulau Jawa serentak mengalami penyusutan. Namun, Provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2020 tidak mengalami eskalasi tingkat pengangguran dan relatif stabil. Hal tersebut berbanding terbalik dengan Provinsi di Pulau Jawa lainnya.

Penerapan upah juga mempengaruhi tingkat pengangguran, dimana kenaikan upah dapat berpengaruh terhadap eskalasi tingkat pengangguran,

sebaliknya penurunan jumlah upah akan menguntungkan perusahaan karena berimplikasi terhadap berkurangnya beban keuangan perusahaan (Widiantari et al., 2023).

Berdasarkan penelitian (Prawoto, 2017) upah memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa berapapun tingkat upah masyarakat akan tetap bekerja. Fenomena ini terjadi akibat adanya kelebihan penawaran tenaga kerja namun permintaan tenaga kerja sektor formal tidak seimbang ketika upah minimum meningkat sehingga berimplikasi terhadap penawaran tenaga kerja berpindah di sektor informal.

Teori upah efisiensi (*efisiensi wage*) menyatakan bahwa upah yang tinggi berimplikasi terhadap produktivitas tenaga kerja (Rahmi & Riyanto, 2022) Kenaikan upah minimum juga disinyalir memiliki *spillover effect* akibat adanya pengaruh eksternalitas, baik positif dan negatif terhadap lapangan kerja dan produktivitas tenaga kerja. Kenaikan upah juga berimplikasi pada substitusi input tenaga kerja dan berpengaruh terhadap eskalasi permintaan tenaga kerja terampil (CAMPOLIETI, 2015).

Menurut data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, menyatakan pada rentang tahun 2013-2022 upah mengalami eskalasi setiap tahun di Provinsi dalam Pulau Jawa. Namun kenaikan upah ini selayaknya berimplikasi terhadap eskalasi TPT akibat beban perusahaan yang semakin tinggi guna menghindari kebangkrutan. Fenomena di 6 Provinsi dalam Pulau

Jawa mengalami fluktuasi tingkat pengangguran dan relatif mengalami penyusutan.

Penelitian yang berkenaan dengan masalah pengangguran telah dilakukan oleh berbagai peneliti menggunakan berbagai indikator. Penelitian yang dilakukan (Muslim, 2014) menganalisis korelasi angkatan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pengangguran terbuka di Yogyakarta. (Prayuda & Dewi, 2015) menganalisis korelasi antara inflasi, investasi dengan pengangguran di Provinsi Bali Tahun 1992-2013. Kompleksitas interaksi di antara faktor-faktor tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualifikasi tenaga kerja dan didukung kebijakan upah minimum yang mungkin berpotensi mengurangi jumlah tenaga kerja dapat menjadi tantangan tersendiri. Variasi ini membutuhkan analisis mendalam terkait karakteristik ekonomi daerah serta kebijakan yang tepat untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka secara efektif di setiap provinsi. Berdasarkan gejala ekonomi dan penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian ini menganalisis pendidikan diproksikan dengan rata-rata lama sekolah, pertumbuhan ekonomi, upah yang diproksikan dengan upah minimum provinsi, dan pengangguran yang diproksikan dengan tingkat pengangguran terbuka. Penelitian ini berjudul **“Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di 6 Provinsi Pulau Jawa”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Rata-Rata Lama Sekolah berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka 6 Provinsi di Pulau Jawa tahun 2013-2022?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka 6 Provinsi di Pulau Jawa tahun 2013-2022?
3. Apakah upah minimum provinsi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka 6 Provinsi di Pulau Jawa tahun 2013-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini Ksebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh antara rata-rata lama sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka 6 Provinsi di Pulau Jawa tahun 2013-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh antara upah minimum provinsi terhadap tingkat pengangguran terbuka 6 Provinsi di Pulau Jawa tahun 2013-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Tingkat pengangguran terbuka 6 Provinsi di Pulau Jawa tahun 2013-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghibahkan utilitas yang berwujud empiris, kebijakan dan teori, sebagai berikut :

1. Secara empiris, penelitian ini dapat menghibahkan utilitas sebagai informasi gambaran perekonomian mengenai pengangguran di Pulau

Jawa. Melalui penelitian ini, mampu memperkuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh pendidikan, upah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran.

2. Secara teori, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi serta data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang menganalisis masalah serupa.
3. Secara kebijakan, penelitian ini dapat menjadi masukan dan kritik bagi pemerintah provinsi guna mempertimbangkan penyusunan kebijakan dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi masalah pengangguran